

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dalam membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan model komunikasi politik Anies Baswedan dan Heru Budi dalam membangun Jakarta, skripsi ini menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan dalam model komunikasi politik mereka. Anies, dengan model yang lebih terbuka, dua arah, dan menggunakan media sosial sebagai alat utama, sangat sesuai dengan teori Lasswell yang menekankan pentingnya saluran komunikasi yang efektif dalam membangun opini publik. Di sisi lain, Heru Budi lebih mengutamakan komunikasi yang bersifat top-down dan terstruktur, mencerminkan pendekatan komunikasi politik yang lebih formal dan terpusat seperti yang dijelaskan oleh Almond dan Verba.

Perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk latar belakang politik dan birokrasi masing-masing tokoh, hubungan mereka dengan pemerintah pusat, serta tujuan politik mereka yang berbeda. Anies, yang memiliki ambisi politik yang lebih besar, terlihat lebih memanfaatkan komunikasi politik untuk membangun citra dan popularitas menjelang Pemilu 2024, sementara Heru lebih berfokus pada implementasi kebijakan yang sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi dan pemerintahan pusat. Dengan demikian, perbedaan ini tidak hanya mencerminkan model komunikasi mereka masing-masing, tetapi juga menjelaskan bagaimana faktor-faktor politik, sosial, dan pribadi memengaruhi cara mereka menyampaikan pesan politik dan membangun hubungan dengan publik, serta bagaimana mereka mempengaruhi pembangunan Jakarta secara keseluruhan.

- a. **Latar Belakang:** Anies yang berlatar belakang akademisi dan aktivis memiliki model komunikasi yang lebih egaliter dan naratif. Sebaliknya, Heru sebagai birokrat cenderung menggunakan pendekatan yang lebih struktural dan hierarkis.
- b. **Tujuan Politik:** Anies menggunakan komunikasi politik sebagai sarana membangun citra untuk persiapan menuju Pilpres 2024. Di sisi lain, Heru

fokus menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur tanpa ambisi politik jangka panjang, sehingga komunikasinya lebih pragmatis.

- c. **Hubungan dengan Pemerintah Pusat:** Hubungan yang kurang harmonis antara Anies dan pemerintah pusat memengaruhi implementasi kebijakan dan komunikasi politiknya. Sebaliknya, hubungan Heru yang dekat dengan pemerintah pusat mempermudah koordinasi, tetapi mengurangi daya tariknya di mata masyarakat yang menginginkan kepemimpinan independen.

Setelah membahas berbagai aspek mengenai perbandingan model komunikasi politik Gubernur Anies Baswedan dan Pj. Gubernur Heru Budi dalam membangun Jakarta, dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang signifikan antara model komunikasi politik yang diterapkan oleh Gubernur Anies Baswedan dan Pj. Gubernur Heru Budi dalam memimpin serta membangun Jakarta. Perbedaan ini bukan hanya berkaitan dengan model komunikasi yang mereka pilih, tetapi juga bagaimana kedua tokoh tersebut mengelola hubungan dengan publik, media, dan pemangku kepentingan lainnya, serta bagaimana komunikasi tersebut mencerminkan karakteristik kepemimpinan masing-masing.

Model komunikasi politik Anies Baswedan dapat digambarkan sebagai model yang lebih terbuka dan partisipatif, sangat bergantung pada penggunaan media sosial dan media massa untuk menjangkau publik. Sebagai seorang pemimpin yang memiliki latar belakang akademik dan pengalaman dalam dunia aktivisme, Anies memanfaatkan media sebagai alat untuk membangun citra positif dirinya di mata masyarakat. Ia menyampaikan pesan-pesan politiknya melalui saluran-saluran yang dapat langsung dijangkau oleh masyarakat, seperti media sosial, video, dan unggahan yang berkaitan dengan kegiatan politik dan sosial budaya yang ia lakukan. Ini adalah bentuk dari komunikasi dua arah yang memungkinkan publik untuk merespons, berinteraksi, dan ikut serta dalam diskusi mengenai kebijakan-kebijakan yang ia jalankan. Anies juga menunjukkan model komunikasi yang sangat responsif terhadap kritik, di mana ia kerap memberikan jawaban atau penjelasan kepada publik melalui media, sehingga menciptakan rasa kedekatan dan transparansi.

Sebaliknya, Heru Budi, yang memiliki latar belakang sebagai birokrat dan teknokrat, mengedepankan model komunikasi yang lebih tertutup dan terstruktur. Model komunikasi politiknya cenderung bersifat top-down, dengan fokus pada implementasi kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat. Sebagai Pj. Gubernur yang ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi, Heru lebih memanfaatkan saluran komunikasi formal dan birokratis dalam mengelola pemerintahan DKI Jakarta. Ia lebih menekankan pada kontrol dan pengawasan kebijakan, yang tercermin dalam pengambilan keputusan yang lebih terpusat dan tidak banyak berinteraksi secara terbuka dengan masyarakat atau media. Heru lebih mengutamakan efektivitas administratif dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di Jakarta, seperti penanganan banjir dan pembangunan infrastruktur, daripada membangun citra pribadi atau berkomunikasi langsung dengan publik.

Perbedaan model komunikasi ini dapat dikaitkan dengan teori-teori komunikasi politik yang relevan. Salah satu teori yang sangat mendukung pemahaman tentang perbedaan model komunikasi ini adalah teori komunikasi politik Harold Lasswell, yang menekankan pentingnya media dalam membentuk opini publik dan membangun citra politik pemimpin. Anies Baswedan, yang sangat memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dengan masyarakat, berupaya untuk membentuk opini publik yang positif melalui komunikasi yang transparan dan langsung. Ia menyampaikan pesan politiknya secara aktif melalui berbagai platform media, dengan tujuan untuk membangun citra dirinya sebagai pemimpin yang merakyat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, media menjadi alat utama yang digunakan oleh Anies untuk menjangkau publik secara luas dan membangun hubungan komunikasi dua arah yang intens.

Sementara itu, model komunikasi Heru Budi dapat dijelaskan menggunakan pendekatan komunikasi politik struktural yang dikembangkan oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba. Dalam pendekatan ini, komunikasi politik dianggap lebih terstruktur dan terpusat pada pemimpin yang memiliki otoritas tinggi, seperti presiden atau gubernur yang memiliki peran sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan masyarakat. Heru, sebagai pejabat yang ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi, lebih berfokus pada penerapan kebijakan yang telah ditetapkan oleh

pemerintah pusat dan bekerja di bawah arahan tersebut. Komunikasi politiknya lebih bersifat top-down, dengan kontrol yang ketat terhadap kebijakan dan implementasinya. Hal ini terlihat dalam pengambilan kebijakan terkait penanganan banjir dan pembenahan birokrasi di Jakarta, yang lebih menekankan pada aspek teknokratik dan administrasi daripada berfokus pada interaksi langsung dengan masyarakat.

Selain itu, perbedaan mendasar dalam model komunikasi politik Anies dan Heru juga mencerminkan aspek psikologis dan sosio-kultural yang mempengaruhi cara keduanya berinteraksi dengan publik. Anies, yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan keterlibatan dalam dunia aktivisme, lebih terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak. Ia cenderung menggunakan komunikasi politiknya untuk membangun citra positif yang lebih pribadi, dengan harapan dapat memperoleh dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk yang mendukungnya untuk maju dalam kontestasi politik yang lebih tinggi. Sebaliknya, Heru, yang lebih berpengalaman dalam dunia birokrasi, lebih berhati-hati dalam berkomunikasi dan lebih memilih untuk menjalankan perintah dan kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat, tanpa banyak mengandalkan interaksi langsung dengan publik.

Dalam konteks teori kepemimpinan politik Robert Elgie, model komunikasi ini juga dapat dipahami dalam kerangka konsep kepemimpinan yang lebih partisipatif versus otoritatif. Robert Elgie mengemukakan bahwa kepemimpinan politik tidak hanya bergantung pada bagaimana seorang pemimpin mengelola kekuasaan, tetapi juga bagaimana mereka mengelola komunikasi untuk membentuk hubungan dengan publik dan mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Anies Baswedan, dengan model komunikasi yang lebih terbuka dan berbasis pada media sosial, lebih mengarah pada kepemimpinan yang partisipatif, di mana ia mencoba untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses komunikasi politik. Sebaliknya, Heru Budi, dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan top-down, lebih mencerminkan kepemimpinan yang otoritatif, di mana ia mengandalkan kontrol dan pengelolaan kebijakan yang lebih terpusat pada pemerintah pusat.

Perbedaan dalam model komunikasi politik ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan keduanya dengan pemangku kepentingan, seperti

DPRD, masyarakat, dan media. Anies Baswedan cenderung memiliki hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, terutama dengan segmen-segmen tertentu yang mendukungnya dalam pemilihan umum, melalui komunikasi dua arah yang intens. Namun, ia juga mengalami tantangan dalam berhubungan dengan pemerintah pusat, mengingat ketegangan politik antara dirinya dengan beberapa kementerian. Sebaliknya, Heru Budi, meskipun memiliki hubungan yang lebih baik dengan pemerintah pusat, menghadapi kritik keras dari sejumlah pihak, termasuk DPRD dan media, terkait model komunikasi publik yang dianggap lemah dan tidak efektif dalam menyampaikan kebijakan kepada masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan komunikasi politik mereka, baik Anies maupun Heru menggunakan pendekatan yang berbeda. Anies berusaha membentuk citra politik yang positif untuk mendukung karier politiknya di masa depan, terutama menjelang Pemilu Presiden, sementara Heru lebih berfokus pada efektivitas dalam menjalankan tugas administratif dan implementasi kebijakan, dengan memperhatikan arahan dari pemerintah pusat. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal bagaimana mereka menyampaikan pesan politik kepada publik, yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan mereka.

Sebagai kesimpulan, perbedaan model komunikasi politik antara Anies Baswedan dan Heru Budi mencerminkan perbedaan pendekatan kepemimpinan mereka dalam membangun Jakarta. Anies, dengan model komunikasi yang lebih partisipatif dan berbasis media sosial, mencoba untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat, sementara Heru, dengan model komunikasi yang lebih teknokratik dan terstruktur, berfokus pada pengelolaan pemerintahan yang lebih birokratis dan administratif. Kedua model komunikasi ini, meskipun berbeda, mencerminkan nilai dan prioritas yang dimiliki masing-masing pemimpin dalam menghadapi tantangan politik dan sosial di Jakarta. Anies, yang mengedepankan pendekatan yang lebih personal dan responsif, memanfaatkan komunikasi politik sebagai alat untuk membangun hubungan dengan masyarakat dan memperkuat citra dirinya sebagai pemimpin yang progresif dan mendekati diri kepada rakyat. Di sisi lain, Heru, yang lebih fokus pada kelancaran implementasi kebijakan dan

pengelolaan administrasi yang efisien, menggunakan model komunikasi yang lebih terstruktur dan berbasis pada saluran formal.

Kedua model komunikasi ini juga dapat dilihat dalam perspektif teori kepemimpinan politik Robert Elgie yang membedakan antara kepemimpinan partisipatif dan otoritatif. Model komunikasi Anies menunjukkan kecenderungannya untuk mengambil peran sebagai pemimpin yang inklusif, yang lebih terbuka terhadap interaksi dengan masyarakat dan berusaha membangun dialog dua arah. Sebaliknya, Heru cenderung beroperasi dalam kerangka kepemimpinan yang lebih otoritatif, dengan mengandalkan struktur formal dan pengambilan keputusan yang lebih terpusat, dengan komunikasi yang lebih terbatas dan fokus pada efektivitas kebijakan.

Perbedaan tersebut juga menciptakan dampak yang signifikan terhadap bagaimana kebijakan mereka diterima oleh masyarakat dan bagaimana mereka berinteraksi dengan pemangku kepentingan lain, termasuk media dan lembaga legislatif. Anies mampu menjangkau publik dengan lebih langsung, memperlihatkan keaktifan di media sosial dan menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat yang dapat mendukung citra politiknya. Heru, meskipun memiliki hubungan yang lebih kuat dengan pemerintah pusat, menghadapi tantangan dalam menyampaikan pesan kebijakan kepada publik dan kurang berhasil dalam membangun hubungan yang lebih dekat dengan warga Jakarta.

Secara keseluruhan, perbandingan model komunikasi politik antara Anies Baswedan dan Heru Budi menunjukkan bagaimana kepemimpinan mereka tercermin dalam cara mereka mengelola komunikasi politik dengan berbagai pihak. Anies memanfaatkan media sosial dan saluran komunikasi langsung untuk membangun citra sebagai pemimpin yang responsif dan dekat dengan rakyat, sementara Heru lebih fokus pada komunikasi teknokratik yang mengutamakan pengendalian dan efisiensi administrasi. Keduanya menunjukkan bahwa model komunikasi politik yang digunakan oleh seorang pemimpin dapat sangat mempengaruhi cara mereka diidentifikasi oleh publik serta cara mereka mengelola pemerintahan dan kebijakan.

6.2 Saran

Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi politik di masa depan, pemimpin daerah perlu memastikan bahwa model komunikasi yang diterapkan selaras dengan implementasi kebijakan di lapangan. Komunikasi yang jelas dan transparan akan membantu masyarakat memahami kebijakan dan mendukung pelaksanaannya, sekaligus mengurangi miskomunikasi. Selain itu, model komunikasi harus sensitif terhadap sosio-kultural masyarakat Jakarta yang pluralistik agar tidak menimbulkan friksi, seperti yang terjadi dengan perubahan slogan oleh Heru Budi.

Pemimpin daerah juga harus proaktif dan responsif terhadap kritik publik, menciptakan saluran komunikasi dua arah agar masyarakat merasa didengar. Pemanfaatan media sosial dan media massa sangat penting untuk membangun narasi positif dan memperkuat hubungan dengan masyarakat. Di sisi lain, penelitian lebih lanjut tentang hubungan komunikasi politik dengan kebijakan publik juga dibutuhkan untuk memberikan wawasan lebih mendalam. Pemimpin daerah harus menghindari polarisasi berlebihan dalam komunikasi politik mereka, menjaga agar kepentingan politik pribadi tidak mengaburkan tujuan utama, yakni kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan yang bijak dan responsif terhadap perubahan zaman, komunikasi politik yang lebih efektif akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan kualitas hidup masyarakat Jakarta.